



Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN 2024



LAKIP

2024

PESAN PIMPINAN

”

“Mewujudkan Good Governance mendorong kapasitas memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat”.



Muharram Idris & Syukri A. Jalil
Bupati & Wakil Bupati
Aceh Besar

”

“Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi pijakan utama yang diwujudkan secara kontinu oleh segenap pemangku kepentingan”.



Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si
Plt.Sekretaris Daerah

Kata Pengantar

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkankehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatnya dan pertolongan-nya sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tahun 2024, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kualitatif, wujud akuntabilitas pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Aceh Besar menuju terwujudnya Good Gavernonce dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

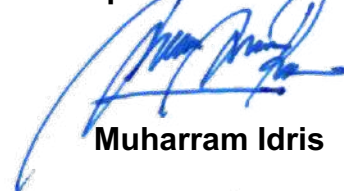
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 secara substansi menjabarkan rencana kinerja tahunan, evaluasi dan uraian analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan informasi yang utuh atas upaya yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026.

Hasil Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Aceh Besar tidak terlepas dari partisipasi aktif dari semua pihak, baik elemen elemen pemerintah, masyarakat dan segenap stakholder yang terkait didalamnya guna perumusan kebijakan, implementasi hingga tercapainya pengawasan yang akuntabel.

Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan kinerja maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di masa yang akan datang

Kota Jantho, 17 Maret 2025

Bupati Aceh Besar,



Muharram Idris



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR INSPEKTORAT

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, S.H. Nomor 1 Kota Jantho Kode Pos 23917,
Email: inspektorat.acehbesar@gmail.com Website: inspektorat.acehbesarkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ini .

Kota Jantho, Maret 2025
a.n BUPATI ACEH BESAR
INSPEKTUR KABUPATEN


Zia Ul Azmi S.H., M.H., CGCAE
Pembina Utama Muda
Nip. 19790716 200504 002



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2023

Daftar Isi

Pesan Pimpinan

1

Kata Pengantar

2

Daftar Isi

3

4

Pendahuluan

5

Perencanaan Kinerja

6

Akuntabilitas Kinerja

7

Penutup

PENDAHULUAN

BAB I



Sekilas Aceh Besar

Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis 5,3°-5,5° Lintang Utara dan 95,55°-94,59° Bujur Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar berada pada hulu aliran Sungai Krueng Aceh. Secara administratif Kabupaten Aceh Besar mempunyai batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Sabang, dan Kota Banda Aceh, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie dan Aceh Jaya dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.



Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah 2.903,49 km², sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan.

Berdasarkan posisi letak, sekitar 10% wilayah gampong merupakan daerah pesisir. Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong. Wilayah kecamatan Kota Jantho yang meliputi 593,00 km² atau lebih dari 20,42 persen dari luas wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah Krueng Barona Jaya, luasnya 6,96 Km² atau hanya 0,24 persen dari luas Kabupaten Aceh Besar.



Kecamatan dengan wilayah tertinggi adalah Kecamatan Lembah Seulawah dengan ketinggian 85 MPDL. dan kecamatan dengan jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Lhoong dengan jarak 106 km.

Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kependudukan

Jumlah Populasi penduduk Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2023 adalah 435.298 Jiwa dengan penduduk laki-laki berjumlah 218.118 Jiwa dan penduduk Perempuan berjumlah 217.180 Jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 100. Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Darul Imarah yang berjumlah 58.494 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Leupung yaitu sebanyak 3.707 jiwa. Berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 paling banyak berada pada rentang umur 5-9 tahun yaitu berjumlah 42.603 jiwa.



Meskipun penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Darul Imarah ternyata Kecamatan Krueng Barona

Jaya menjadi Kecamatan terpadat dengan jumlah penduduk 2.660 jiwa/Km² sedangkan terjarang terdapat di Kecamatan Kota Jantho yaitu hanya 15 jiwa/Km² (dengan kepadatan rata-rata Kabupaten Aceh Besar 149 jiwa/Km²). Sehingga rata-rata laju pertumbuhan penduduk pertahun 2022-2023 (1,43 %).

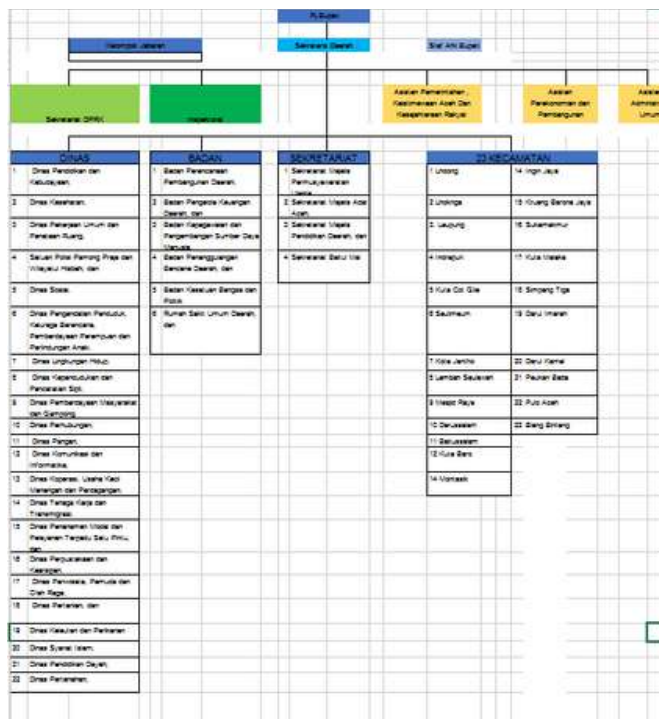
Ketenagakerjaan



Pada tahun 2023, Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Aceh Besar ada sebanyak 206,437 jiwa dan jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 102,310 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut , sebanyak 189.576 jiwa berstatus bekerja, sedangkan 16.861 jiwa merupakan pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.

Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Aceh Besar paling banyak adalah Buruh/Karyawan/Pegawai yaitu 81.989 jiwa sedangkan paling sedikit adalah Berusaha dibantu buruh tetap yaitu 6.217

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Besar



Sumber. Profil Pembangunan Aceh Besar 2023

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dijabat oleh Pejabat Bupati sampai dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2025. Dalam melaksanakan tugasnya, Pj. Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah beserta jajaran di bawahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Perangkat Daerah, pada tahun 2018 Kabupaten Aceh Besar telah menyusun dan membentuk kembali perangkat daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah, maka itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang merupakan unsur pelaksana pemerintah

daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang menangani urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 5 (lima) dinas yaitu :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; dan
4. Dinas Sosial.

Berdasarkan Qanun yang sama Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 11 (sebelas) dinas yaitu :

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Dinas Lingkungan Hidup;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
5. Dinas Perhubungan;

6. Dinas Pangan;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdapat juga Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan pilihan, terdiri dari 3 (tiga) dinas yaitu :

1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 2. Dinas Pertanian; dan
 3. Dinas Kelautan dan Perikanan
- Perangkat Daerah yang menangani urusan keistimewaan dan kekhususan, terdiri dari :

1. Dinas Syariat Islam;
2. Dinas Pendidikan Dayah;
3. Dinas Pertanahan;
4. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
5. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
6. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah; dan
7. Sekretariat Baitul Mal.

Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah;

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selain yang sudah tersebut di atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2018 masih menjelaskan Perangkat Daerah lain, terdiri dari :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
2. Rumah Sakit Umum Daerah; dan

Pemerintah Kecamatan

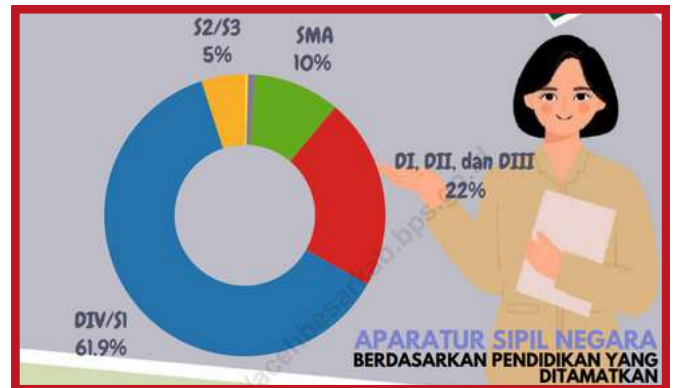
Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.

Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar berjumlah 23 Kecamatan yang merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Keadaan Pegawai

**Jumlah
PNS
Tahun 2023
5.794**

Jumlah pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 sebanyak 5.794 orang yang terdiri dari 1.705 laki-laki dan 4.089 perempuan. Jenjang Pendidikan Terakhir yang paling banyak ditamatkan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Besar adalah Sarjana/S1 sejumlah 3.166 orang yang terdiri dari 913 laki-laki dan 2.253 perempuan. Golongan/Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Besar paling banyak adalah pangkat/Golongan III/D yaitu 1.251 orang yang terdiri dari 344 laki-laki dan 907.



Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/Desember 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 30 orang, Administrator 176 orang, Pengawas 247 orang, Jabatan Fungsional Dosen 1 orang, Jabatan Fungsional guru 1702 orang, Jabatan Fungsional Medis 1.088 orang, Jabatan Fungsional Teknis 589 orang, Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana 1.961 orang.

Disamping PNS untuk mendukung pencapaian Kinerja Pemerintah juga tidak terlepas dari Tenaga honorer/Kontrak yang terdiri dari tenaga administrasi perkantoran, tenaga paramedis, sopir, Satpol PP, Wilayatul Hisbah dan Tenaga Kebersihan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 2351 orang.



Isu Strategis

Isu-isu Strategis Pembangunan Kabupaten Aceh Besar mengacu pada Isu Strategis nasional dan Isu Strategis Aceh. Kondisi Kabupaten Aceh Besar yang memerlukan penanganan yang sangat urgensi. Isu strategis merupakan perbedaan (gap) antara kondisi saat ini (existing) dengan harapan yang tergambar tujuan pembangunan dalam masa transisi selama 4 tahun, menyelesaikan permasalahan yang belum selesai pada program sebelumnya dan melaksanakan optimalisasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan

ISU STRATEGIS NASIONAL

- Peningkatan produktivitas dan skala ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung kedaulatan pangan (melalui food estate dan korporasi petani dan nelayan);
- Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan per kapita melalui pengembangan major project pengembangan industri dan UMKM terpadu;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan (jalan tol dan pembangkit listrik);

- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera; dan
- Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

ISU STRATEGIS ACEH

- Peningkatan Kualitas Demokrasi
- Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam
- Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
- Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan
- Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
- Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
- Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
- Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan

- Optimalisasi Kemandirian Pangan
- Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran
- Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis
- Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana.
- Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan

Isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut.

- **Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024** difokuskan kepada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang adil, transparan dan bebas money politic dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan keterwakilan perempuan dalam pesta demokrasi tersebut, tidak kalah pentingnya adalah memastikan keterwakilan perempuan dalam pesta demokrasi tersebut.
- **Penanganan Covid 19** difokuskan padapenciptaan imunitas masyarakat melalui perluasan cakupan vaksisasi, dan aksi pencegahan lainnya seperti tetap memakai masker, menjaga jarak, menunda atau membatasi perjalanan dan juga mengiringi dengan doa.
- **Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kualitas Pendidikan** difokuskan kepada berupa peningkatan kelembagaan,

sumberdaya manusia, penambahan pra sarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik berfokus ke kompetensi keahlian dan pemerataan keahlian di setiap sekolah.

- **Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar** difokuskan dengan mengoptimalkan peningkatan skala ekonomi dan penumbuhan pusat-pusat ekonomi baru yang berbasis kawasan dengan pendekatan terintegrasi hulu hilir, merubah orientasi pasar produknya dari pasar lokal ke pasar regional Provinsi dan tingkat nasional dan fokus pengembangan dilakukan terhadap peningkatan produktifitas dan nilai tambah komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan dan meningkatkan diversifikasi pangan. Optimalisasi koperasi, usaha/kelompok usaha kecil dan menengah perlu dilakukan dengan dukungan pendampingan dana yang cukup dari berbagai sumber yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- **Kinerja Tata Kelola Pemerintah** difokuskan dengan Membangun Profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah, Meningkatkan Pelayanan publik atau pelayanan umum yang bersifat responsif/aktif: Penguatan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan praktik good and clean governance dan Penguatan azas akuntabilitas berupa pertanggung jawaban pejabat publik terhadap masyarakat dalam membangun pemerintahan yang

bersih dan berwibawa.

- **Peningkatan kualitas dan Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan dan Penanganan Stunting** difokuskan dengan Penerapan Germas dan konsumsi pangan dengan gizi seimbang mulai dari remaja pra nikah, ibu hamil, sampai bayi dan balita menjadi kunci keberhasilan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Besar.
- **Penguatan nilai-nilai Syariat Islam, Kebudayaan, Keistimewaan Aceh** difokuskan dengan peningkatan kemampuan membaca Al-Quran di kalangan anak anak, orang dewasa dan lanjut usia. Mengadakan kegiatan berupa kelompok pengajian membaca Al Quran dengan memberdayakan tempat-tempat ibadah. Melaksanakan optimalisasi peran ulama dalam pembangunan dan peningkatan SDM tentang syariat Islam yang juga merupakan faktor yang mempengaruhi peningkatan minat belajar al quran dan ilmu agama di kalangan masyarakat, perlu peningkatan pelatihan dan pemberian beasiswa untuk mencetak ulama di lembaga pendidikan yang berpretise baik, peningkatan kegiatan event islami yang masih kurang pembinaannya, dibentuk adanya gampong percontohan syariat, memperkuat kelembagaan yang telah ada untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan, dan pendataan dan penertiban asset wakaf.

- **Penanggulangan Pencemaran Lingkungan hidup dan Kebencanaan** difokuskan dengan perencanaan dan pembangunan RTH, sosialisasi dan regulasi hal kebersihan lingkungan dan termasuk Regulasi persampahan di seluruh wilayah kabupaten.
- **Penurunan angka Kemiskinan** difokuskan dengan Peningkatan sarana prasarana pertanian, perikanan termasuk pasar rakyat dan pasar induk perlu dioptimalkan serta dikembangkan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.
- **Pengangguran dan Ketenagakerjaan** difokuskan dengan peningkatan kompetensi keahlian lulusan melalui magang industri dan pelatihan/training pada lembaga asosiasi profesi yang sesuai dengan pasar kerja lapangan kerja/ usaha baru, peningkatan serta mengoptimalkan Balai latihan kerja (BLK), mengundang investor untuk berinvestasi, dan melaksanakan kerja sama investasi baik dengan investor lokal maupun investor asing. Mengaktifkan dan mengoptimalkan sentra sentra industri yang telah ada dan mempromosikan kawasan industri khusus
- **Peningkatan Infrastruktur dan konektivitas antar daerah penunjang Ekonomi** difokuskan dengan pembangunan jalan kabupaten, jalan kecamatan dan jalan desa, pengairan, air minum dan drainase

PERENCANAAN KINERJA

BAB II



VISI, MISI, Tujuan dan Sasaran

Hasil evaluasi RPJM kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 memberikan informasi beberapa indikator tujuan dan sasaran yang sudah tercapai dilaksanakannya dan juga masih terdapat perencanaan yang harus dilanjutkan pelaksanaannya RPD Kabupaten Aceh Besar untuk periode 2023-2026. Merujuk pada Visi Pembangunan RPJP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005 - 2025 yaitu :



**VISI PEMBANGUNAN RPJP
:"TERWUJUDNYA
MASYARAKAT ACEH BESAR
YANG MAKMUR DAN
SEJAHTERA"**

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar, adalah:



**VISI PEMBANGUNAN RPJMD
"TERWUJUDNYA ACEH BESAR
YANG MAJU, SEJAHTERA DAN
BERMARTABAR DALAM
SYARIAH ISLAM"**

Visi diatas diwujudkan melalui implementasi melanjutkan misi-misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

- Pelaksanaan Syariat Islam.
- Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government), Bersih (Clean Government) dan Bertanggung Jawab (Responsible Government).
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur.
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Mukim dan Gampong.
- Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal.

Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada maka dalam RPD Kabupaten Aceh Besar 2023-2026 ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai berikut Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 telah ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2024:

01 |PENINGKATAN KUALITAS SDM BERDAYA SAING

- Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,18

- Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,20
Angka Stunting	%	23,40

- Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	47,85
Kategori Kabupaten layak anak	Kategori	Madya

02 |MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PELAYANAN DASAR

- Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Dasar

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Angka Kemiskinan	%	13,05

- Meningkatnya Kesejahteraan PPKS

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos	%	15,68

- Meningkatnya Ketahanan Pangan

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	84,94

- Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Indeks Desa Membangun	Indeks	0,72

- Menurunnya Angka Penganggurann

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,52

- Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Persentase Kawasan Permukiman yang Mendapat Dukungan PSU	%	68

03 | MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN

- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Partisipatif, Koordinatif dan Akuntabel serta Berorientasi Kebutuhan

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,64
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,6
Nilai EPPD	Nilai	2,71
Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	62,74
Tingkat Maturitas SPIP	Level	III
Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,79

04 | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN TATA KELOLA LINGKUNGAN

- Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	42,80

- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Besar

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,00
Ketaatan terhadap RTRW	%	87,05

05 | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,00

- Menciptakan Iklim Investasi

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Jumlah Nilai Investasi	Rp. Milyar	600,00

06 | OPTIMALISASI KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM

- Meningkatkan Penegakan Ketertiban dan Ketentraman Umum

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Persentase Pelanggaran Qanun yang Tertangani	%	90,00

- Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Indeks Resiko Bencana	Indeks	0,41

Program Kegiatan Tahun 2024

Program dan anggaran perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mendukung capaian sasaran pada tahun 2024 sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	94.341.500
2	Program Pendidikan Dayah	5.055.000.000
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.825.999.798
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	189.758.663.744
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.135.256.800
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3,200,000,000.00
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.206.000.000
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.000.000.000
9	Program Penyelenggaraan Jalan	16,912,532,800.00
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.269.859.000

11	Program Kawasan Permukiman	3.090.000.000
12	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.922.136.808
13	Program Penanggulangan Bencana	1.407.057.000
14	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.393.704.000
15	Program Penanganan Bencana	827.030.000
16	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.620.000.000
17	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	50.271.000
18	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	124.327.500
19	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.317.990.600
20	Program Penanganan Kerawanan Pangan	42.360.000
21	Program Pengawasan Keamanan Pangan	100.000.000
22	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	31.599.950
23	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	179.999.956
24	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	19.999.792

25	Program Administrasi Pemerintahan Desa	796.877.750
26	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	165.308.845
27	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.481.923.212
28	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	6.738.770.000
29	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.600.000.000
30	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.132.477.000
31	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	60.700.000
32	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	219.887.798
33	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.104.949.348
34	Program Pengembangan Kebudayaan	260.000.000
35	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	50.000.000
36	Program Pembinaan Perpustakaan	625.638.058
37	Program Pengelolaan Arsip	293.476.350
38	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	115.911.000

39	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.389.487.730
40	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	269.998.350
41	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.262.831.358
42	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.180.400.000
43	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	400.000.000
44	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.527.534.874
45	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.920.579.024
46	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18.718.801.000
47	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.043.369.566
48	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	584.544.000
49	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	567.603.239.422
50	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	975.126.812
51	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.084.267.591
52	Program Kepegawaian Daerah	537.000.000

53	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	405.125.710
54	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.875.759.400
55	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	358.704.000
56	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.618.203.727
57	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	926.660.000
58	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	69.927.000
59	Program Pembinaan dan Pengembanagan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	247.476.000
60	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	739.010.970
61	Program Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	144.073.647
62	Program Baitul Mal	17.212.000.000
63	Program Syariat Islam Aceh	3.711.060.000
Total		895.035.229.790

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III



Capaian Kinerja

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Analisis Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :
Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian Kinerja pada tingkat sasaran digunakan skala pengukuran dengan Rentang Capaian dan kategori capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 ISkala Nilai Peringkat Kerja berdasarkan Interval nilai Realisasi Kerja dan kriteria penilaian Realisasi Kerja $90,01\% \leq 100\%$ Sangat Tinggi $75,01\% \leq 90\%$ Tinggi $65,01\% \leq 75\%$ Sedang $50,01\% \leq 65\%$ Rendah dan $\leq 50\%$ Sangat Rendah.

Di tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan 6 tujuan, 16 sasaran kinerja dan 24 indikator kinerja. Pada akhir tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah melaksanakan seluruh tujuan dan sasaran, indikator kinerja yang telah menjadi tanggung jawabnya walaupun tidak semua target dapat terealisasi dengan sempurna. Adapun seluruh pencapaian tujuan, sasaran diuraikan dalam realisasi indikator kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 dengan Target RPD 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI KINERJA 2024	CAPAIAN KINERJA 2024	TARGET AKHIR RPD 2026	CAPAIAN 2024 S/D AKHIR TAHUN RPD 2026	INSTANSI
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,18	76,57	103	74,78	102,39	Dispenbud dan
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	71,20	87,35	122,68	71,55	122,08	DinKes
		Angka Stunting	23,40	16,70	71,37	14,00	119,29	
3	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	47,85	63,56	132,83	48,33	131,51	DPPKBPP PA
		Kategori Kabupaten layak anak	Madya	Madya	100,00	Nindya	66,66	
4	Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pelayanan dasar	Angka Kemiskinan	13,05	13,21	101,23	12,05	109,63	Dinas Sosial
5	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh Bansos	15,68	17,29	110,27	19,70	87,77	
6	Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	84,94	84,72	99,74	85,80	98,74	Dinas Pangan

7	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	0,72	0,703	97,64	0,76	92,5	DPMG
8	Menurunnya angka pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	6,52	7,93	21,63	5,42	146,31	Disnakertrans
9	Meningkatnya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat	Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	68	68	100,00	74	91,89	Dinas PUPR
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, koordinatif dan akuntabel serta berorientasi kebutuhan	Indeks Reformasi Birokrasi	80,64	44,99	55,79	51	88,22	SetdaKab
		Indeks Pelayanan Publik	3,6	3,58	99,44	4,1	87,32	
		Nilai LPPD	2,71	2,6074	96,21	2,72	95,86	
		Nilai Evaluasi LAKIP	62,74	54,90	87,50	64,55	85,05	
		Tingkat Maturitas SPIP	III	III	100,00	III	100,00	Inspektorat
		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,79	2,39	85,66	3,3	72,42	DISKOMINFO
11	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	42,80	35,73	83,11	66,88	53,18	Dinas PUPR
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Besar	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,00	71,58	94,18	76,50	93,57	DLHK
		Ketaatan terhadap RTRW	87,05	91	104,54	87,05	104,54	Dinas PUPR

13	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	4,00	4,15	103,75	4,40	94,32	Bappeda
14	Menciptakan iklim investasi	Jumlah Nilai Investasi	600,00	384,92	64,15	600,00	64,15	DPMPTSP
15	Optimalisasi Ketertiban dan ketentraman umum	Persentase Pelanggaran Qanun yang tertangani	90,00	90,12	100,13	95,00	94,86	Satpol-PP
16	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks risiko bencana	0,41	0,38	92,68	0,41	92,68	BPBD

Capaian Kinerja

1. PENINGKATAN KUALITAS SDM BERDAYA SAING

Peningkatan Kualitas SDM berdaya saing merupakan kebijakan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam rangka mewujudkan perubahan signifikan kearah yang lebih baik. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing dihitung berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Bidang Pendidikan merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah sama halnya dengan bidang kesehatan dalam menunjang Peningkatan Kualitas SDM berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran yang dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1.1 TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS DAN BERKARAKTER

Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat cerdas dan berkarakter adalah salah satu sasaran dari peningkatan kualitas SDM berdaya saing yang dapat dihitung berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu; umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Berdasarkan data IPM tahun 2024 yaitu capaian kinerja sebesar 103% dikategorikan sangat baik dengan realisasi sebesar 76,57 indeks yaitu naik 0,59 poin dibandingkan tahun 2023 dengan IPM sebesar 75,98 indeks. Pencapaian IPM ini telah melebihi target RPD 2024 sebesar 74,18 indeks.

Intisari :

**Sasaran 1.1:
“Capaian IPM tahun 2024 dikategorikan sangat baik dengan realisasi diatas target dan peningkatan 0,59 poin dari IPM tahun 2023”.**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,18	76,57	103



Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 berdasarkan RPJM Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui pengukuran 35 (tiga puluh lima) sasaran dan 54 (Lima Puluh Empat) Indikator kinerja Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dianalisis penilai rata-rata kumulatif, maka pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masuk dalam kategori Sangat Tinggi dengan nilai capaian 98,45%. Sedangkan Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tahun 2024 berdasar RPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui pengukuran terhadap 16 (enam belas) sasaran dan 24 (dua Puluh Empat) Indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dianalisis penilai rata-rata kumulatif, maka pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masuk dalam kategori Sangat Tinggi dengan nilai capaian 93%, namun jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2023 dengan capaian Kinerja Tahun 2024 hanya terdapat 16 sasaran yang masih dilaksanakan seperti daftar di bawah ini:

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	102,43	103
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	102,96	122,68
		Angka Stunting	96,77	71,37
3	Meningkatnya pengarus utamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100,08	2,7162
		Kategori Kabupaten layak anak	100,00	100,00
4	Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pelayanan dasar	Angka Kemiskinan	-	101,23
5	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh Bansos	NA	110,27
6	Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	96,45	99,74
7	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	97,14	97,64
8	Menurunnya angka pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	15,56	21,63

9	Meningkatnya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat	Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	100,00	100,00
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, koordinatif dan akuntabel serta berorientasi kebutuhan	Indeks Reformasi Birokrasi	-	55,79
		Indeks Pelayanan Publik	-	99,44
		Nilai EPPD	96,39	96,21
		Nilai Evaluasi LAKIP	85,15	87,50
		Tingkat Maturitas SPIP	100,00	100,00
		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	105,03	85,66
11	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	84,13	83,11
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Besar	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	94,57	94,18
		Ketaatan terhadap RTRW	104,60	104,54
13	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	109,48	103,75
14	Menciptakan iklim investasi	Jumlah Nilai Investasi	85,88	64,15
15	Optimalisasi Ketertiban dan ketentraman umum	Persentase Pelanggaran Qanun yang tertangani	109,64	100,13
16	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks risiko bencana	80,49	92,68

Realisasi Anggaran SKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

NO	SKPK	ANGGARAN REVISI / PERUBAHAN	BELANJA	SELISIH	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	FISIK (%)	KEUANGAN (%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KABUPATEN ACEH BESAR		1.953.475.965.618	1.953.475.965.618	-	83,68	1.796.631.669.341	156.844.296.277	8,03
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.526.838.686	6.526.838.686	-	75,27	4.632.133.465	1.894.705.221	29,03
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	59.822.967.326	59.822.967.326	-	83,72	59.122.126.757	700.840.569	1,17
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.682.530.636	8.682.530.636	-	100,00	7.389.399.257	1.293.131.379	14,89
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	642.077.634.382	642.077.634.382	-	99,73	622.672.719.273	19.404.915.109	3,02
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.463.838.453	9.463.838.453	-	65,79	7.566.974.569	2.076.862.884	21,95
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.097.120.375	6.097.120.375	-	74,05	5.240.589.145	856.531.230	14,05
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.049.068.578	5.049.068.578	-	88,14	4.454.422.689	594.645.889	11,78
8	DINAS KESEHATAN	252.968.858.458	252.968.858.458	-	99,06	240.664.587.001	12.304.271.457	4,86
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.828.012.133	10.828.012.133	-	79,32	10.317.883.577	510.128.556	4,71
10	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	10.997.649.499	10.997.649.499	-	85,36	9.641.019.962	1.256.629.537	12,34
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.746.484.216	14.746.484.216	-	85,41	13.829.584.235	916.899.981	6,22
12	DINAS PANGAN	5.087.752.610	5.087.752.610	-	95,60	4.506.263.003	581.489.607	11,43
13	DINAS PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	11.033.689.079	11.033.689.079	-	94,13	9.855.829.878	1.177.859.201	10,68
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	117.387.358.613	117.387.358.613	-	89,47	112.562.465.366	4.824.893.247	4,11
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	7.895.097.154	7.895.097.154	-	96,84	7.441.383.728	453.713.426	5,75
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.508.000.444	8.508.000.444	-	86,06	7.175.003.296	1.332.997.148	15,67
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	399.789.493.333	399.789.493.333	-	51,05	335.343.255.259	64.446.238.074	16,12
18	DINAS PENDIDIKAN DAYAH	11.591.621.947	11.591.621.947	-	100,00	11.763.134.461	228.487.486	1,91
19	DINAS PERHUBUNGAN	8.112.971.653	8.112.971.653	-	76,65	7.674.646.271	498.325.382	6,14
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.303.107.046	5.303.107.046	-	83,83	4.968.721.238	334.385.808	6,31
21	DINAS PERTANAHAN	2.403.300.566	2.403.300.566	-	75,74	1.896.135.299	507.165.267	21,10
22	DINAS PERTANIAN	64.832.602.487	64.832.602.487	-	82,26	57.885.160.267	6.947.442.220	10,72
23	DINAS PPKB, PP DAN PA	15.984.495.178	15.984.495.178	-	93,63	14.713.213.814	1.271.281.364	7,95
24	DINAS SOSIAL	9.488.563.695	9.488.563.695	-	96,06	8.140.219.637	1.348.344.058	14,21
25	DINAS SYARIAH ISLAM	8.778.980.602	8.778.980.602	-	97,31	8.464.061.912	314.918.690	3,59
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.309.177.847	4.309.177.847	-	93,02	3.764.914.741	544.263.106	12,63
27	DINSPEKTORAT	10.890.262.894	10.890.262.894	-	80,60	9.801.598.883	1.078.664.011	9,91
28	KECAMATAN BAITUSSALAM	2.053.766.308	2.053.766.308	-	93,74	1.861.211.107	192.495.201	9,37
29	KECAMATAN BLANG BINTANG	2.302.659.052	2.302.659.052	-	96,51	2.192.535.425	110.123.627	4,78
30	KECAMATAN DARUL IMARAH	2.473.796.332	2.473.796.332	-	96,77	2.218.579.913	255.216.419	10,32
31	KECAMATAN DARUL KAMAL	2.448.481.849	2.448.481.849	-	96,80	2.220.369.659	228.112.190	9,32
32	KECAMATAN DARUSSALAM	2.272.039.177	2.272.039.177	-	72,46	2.024.714.581	247.324.596	10,89
33	KECAMATAN INDRAPURI	2.471.746.751	2.471.746.751	-	99,47	2.297.136.557	174.610.194	7,06
34	KECAMATAN INGIN JAYA	2.738.635.883	2.738.635.883	-	98,02	2.551.694.425	186.941.458	6,83
35	KECAMATAN KOTA JANTHO	1.869.896.371	1.869.896.371	-	78,24	1.750.447.510	118.948.861	6,36
36	KECAMATAN KREUNG BARONA JAYA	2.572.398.971	2.572.398.971	-	98,51	2.349.155.294	223.243.677	8,68
37	KECAMATAN KUTA BARO	2.631.834.477	2.631.834.477	-	97,37	2.387.544.002	244.290.475	9,28
38	KECAMATAN KUTA COT GLIE	1.929.888.264	1.929.888.264	-	57,53	1.378.032.750	551.855.514	28,59
39	KECAMATAN KUTA MALAKA	1.870.963.269	1.870.963.269	-	52,37	1.283.462.091	587.501.178	31,40
40	KECAMATAN LEUMBEEH SEULAWAH	1.771.515.262	1.771.515.262	-	2,78	1.527.791.613	243.723.649	13,76
41	KECAMATAN LEUPUNG	1.636.814.956	1.636.814.956	-	27,13	1.508.354.316	128.460.640	7,85
42	KECAMATAN LHOONGA	1.771.052.319	1.771.052.319	-	78,39	1.469.594.569	301.457.750	17,02
43	KECAMATAN LHOONG	1.633.021.826	1.633.021.826	-	100,00	1.485.923.226	147.098.600	9,01

NO	SKPK	ANGGARAN REVISI / PERUBAHAN	BELANJA	SELISIH	REALISASI			SISA ANGGARAN	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	KECAMATAN MESJID RAYA	1.810.565.786	1.810.565.786	-	99,03	1.706.577.127	94,26	103.988.659	5,74
45	KECAMATAN MONTASIK	2.362.162.041	2.362.162.041	-	100,00	2.154.594.791	91,21	207.567.250	8,79
46	KECAMATAN PEUKAN BADA	2.974.856.168	2.974.856.168	-	67,05	2.386.474.421	80,22	588.381.747	19,78
47	KECAMATAN PULO ACEH	1.745.800.418	1.745.800.418	-	93,73	1.649.252.256	94,47	96.548.160	5,53
48	KECAMATAN SEULIMEUM	2.637.552.106	2.637.552.106	-	91,97	2.493.732.047	94,55	143.820.059	5,45
49	KECAMATAN SIMPANG TIGA	2.042.981.155	2.042.981.155	-	90,48	1.914.518.888	93,71	128.462.267	6,29
50	KECAMATAN SUKA MAKMUR	2.148.051.226	2.148.051.226	-	98,45	2.039.044.654	94,93	109.006.572	5,07
51	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	41.219.847.130	41.219.847.130	-	97,78	40.570.359.963	98,42	649.487.167	1,58
52	SATPOL PP DAN WH	15.390.741.818	15.390.741.818	-	86,98	13.734.625.259	89,24	1.656.116.559	10,76
53	SEKRETARIAT BAITUL MAI	19.668.669.796	19.668.669.796	-	25,80	10.217.656.611	51,95	9.451.013.185	48,05
54	SEKRETARIAT DAERAH KAHUPATEN	42.068.575.830	42.068.575.830	-	71,23	33.954.871.396	80,71	8.113.704.434	19,29
55	SEKRETARIAT DPRK	60.135.829.462	60.135.829.462	-	73,68	56.947.773.489	94,70	3.188.055.973	5,30
56	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	1.683.438.995	1.683.438.995	-	94,37	1.280.280.080	76,05	403.158.915	23,95
57	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	1.342.364.767	1.342.364.767	-	98,37	1.290.268.574	96,12	52.096.193	3,88
58	SEKRETARIAT MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA	2.748.599.963	2.748.599.963	-	90,03	2.537.093.352	92,30	211.506.611	7,70

Sumber data dari RFK triwulan IV Tahun 2024 Kabupaten Aceh Besar

Penghargaan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024



Kabupaten Aceh Besar berhasil meraih penghargaan sebagai Forum Anak Berdedikasi dalam Fatar Award 2024 yang diselenggarakan oleh Forum Anak Tanah Rencong (FATR).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua FATR, Amrina Habibi SH MH, pada 10 Agustus 2024 lalu di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi FORASEU dalam mengembangkan program inovatif dan aksi nyata di bidang perlindungan anak dan remaja. Keberhasilan FORASEU didukung oleh program unggulan bertajuk Youth for Health Implementing the Act (Y4H IMPACT). Program tersebut berfokus pada upaya melawan perubahan iklim dan polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat. DP2KB PP dan PA Aceh Besar menyatakan bahwa kolaborasi melibatkan berbagai pihak, termasuk UNICEF Aceh dan PKBI Aceh, menjadi kunci keberhasilan program ini.

Penghargaan ini menjadi instrumen evaluasi sekaligus pendampingan dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Pada tingkat kabupaten/kota, penilaian mencakup lima SKPD, yaitu DPMPTSP, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta dua Puskesmas. Pj Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si., memberikan apresiasi atas keberhasilan seluruh kabupaten/kota di Aceh mempertahankan predikat Zona Hijau. Prestasi ini adalah hasil kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Aceh Besar.



Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh

Aceh Besar sendiri meraih pencapaian Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral tahun 2024 dengan Predikat Baik. Penghargaan tingkat nasional itu diserahkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. Pj Bupati Muhammad Iswanto menyampaikan apresiasi kepada semua OPD dan stake holder terkait yang telah berpartisipasi dan mendukung aktif selama ini, sehingga Aceh Besar berhasil mendapat penghargaan ketiga terbaik se-Aceh dari BPS dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Keberhasilan yang diraih Kabupaten Aceh Besar ini juga tak terlepas dari komitmen Pemkab Aceh Besar dan seluruh jajarannya yang selalu mendukung setiap program kestatistikan secara nasional. Evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral tersebut dilakukan secara nasional dengan mengikutsertakan instansi pusat dan Pemerintah Daerah se-Indonesia. Untuk tahun 2024, sebanyak 11 kabupaten/kota di Aceh berhasil meraih predikat baik dan Aceh Besar mampu menjadi terbaik ketiga.



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar meraih peringkat III nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral (IPSS) tahun 2024



Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui DPPKBPPPA, meraih berbagai Penghargaan Bangga Kencana pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) terkait program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh

Penghargaan yang diraih Aceh Besar itu sebagai apresiasi dukungan terhadap Sekolah Lansia, Apresiasi SMAN 1 Lhoknga sebagai Sekolah Siaga Kependudukan, Penghargaan iBangga Award 2024, Gampong Terbaik Keluarga Berkualitas Tahun 2024 yang diraih Gampong Meunasah Baro Kemukiman Lamihom, Kecamatan Lhoknga, dan menjadi Role Model TPMB tingkat Nasional Regional luar Jawa-Bali. capaian itu adalah buah kerja keras dan kerja cerdas seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar. Itu adalah hasil kerja kolektif mulai dari tataran atas hingga petugas lapangan.



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menerima piagam penghargaan dari Harian Serambi Indonesia dalam bentuk Serambi Award 2024 kategori Pelopor Pangan Murah untuk warga.

Piagam Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Pemimpin Perusahaan Serambi Indonesia Firdaus dan Pemimpin Redaksi (Pemred) Serambi Indonesia Zainal Arifin M Nur serta diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar. Anugerah tersebut merupakan bukti yang telah diakui oleh insan pers perusahaan Serambi Indonesia terkait kerja nyata Pemkab Aceh Besar terhadap program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan untuk warga. Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dukungan masyarakat Aceh Besar, sehingga Kabupaten Aceh Besar dapat terus berkarya dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Iswanto juga berharap agar Serambi dapat terus bersinergi dengan pemerintah dan semua pihak dalam memberi informasi kepada masyarakat sesuai tema yang diangkat 'Sinergi Membangun Negeri'.

Aceh Besar berhasil meraih dua penghargaan pada lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) XXV tahun 2024. Kedua penghargaan tersebut yaitu Juara pertama lomba Posyantek Terbaik, yang diraih Posyantek Naturi dan Juara tiga lomba Posyantek Terbaik, yang diraih Posyantek Maju Bersama. Penghargaan ini membuktikan kita mampu terus berkarya dan berinovasi serta mampu menghidupkan Posyantek di Aceh Besar



Pj Gubernur Aceh Bustami SE MSI menyerahkan penghargaan Juara I Posyantek terbaik tahun 2024 kepada Faisal, Ketua Posyantek Naturi Aceh Besar



Penghargaan dalam kategori APRESIASI KINERJA MEMUASKAN BUMD & BLUD TOP 100 CHOICE AWARD 2024 yang diberikan oleh 7Sky Media dan Majalah IM Indonesia dan didukung oleh Center for Achievement Development Programs, di RSUD Aceh Besar

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Besar sukses menorehkan penghargaan di level Nasional pada kategori Kinerja Memuaskan BUMD & BLUD-Top 100 Chouce Award 2024. Event ini merupakan ajang penghargaan bergensi yang diselenggarakan oleh 7Sky Media dan Majalah IM Indonesia dan didukung oleh Center for Achievement Development Programs. Penghargaan ini di persembahkan bagi BUMD & CEO BUMD yang dinilai telah memiliki prestasi yang memuaskan serta berkontribusi tinggi dalam pembangunan daerah. Yang terpilih adalah BUMD & CEO BUMD yang berhasil bertahan serta tumbuh kembang, sehingga bisa memenangkan persaingan di era kompetisi yang sangat ketat ini. Penghargaan ini mengacu pada beberapa kriteria yaitu corporate sustainability, corporate awareness, corporate image, corporate strenght, corporate innovation dan juga media engagement. Selain itu, juga dengan pengukuran seperti pengelolaan manajemen yang baik, kepuasan & loyalitas konsumen dan mengembangkan inovasi, Prestasi membanggakan ini diraih berkat kinerja dan pelayanan kesehatan dengan komitmen serta totalitas tinggi yang diberikan oleh pihak RSUD Aceh Besar kepada masyarakat. Sudah banyak program-program nasional yang dijalankan seperti program penyakit menular dan pihak RSUD Aceh Besar juga telah menjalankan kegiatan yang memberikan kontribusi baik terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu, program antrian online yang dijalankan RSUD Aceh Besar juga telah berjalan secara maksimal, bahkan sudah mencapai target di bawah 60 menit untuk antrian pasien.

Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024

- **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Inovasinya Counter Pelayanan Disdik Aceh Besar di Mall Pelayanan Publik (MPP) Aceh Besar, Lambaro**



Realisasi peluncuran counter layanan di MPP itu semata mata untuk mempermudah pelayanan primer sektor pendidikan dan kebudayaan di Aceh Besar. Hal ini dilakukan mengingat wilayah Aceh Besar punya jangkauan yang luas sehingga dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama stake holder pendidikan. Karena lokasi MPP Lambaro menjadi titik tengah Kabupaten Aceh Besar, mulai dari Lhoong hingga Saree ataupun dari

kecamatan Masjid Raya hingga Pulo Aceh. Kehadiran Disdukbud Aceh Besar di MPP Lambaro menjadikan Aceh Besar sebagai salah satu pionir inovasi pelayanan publik di MPP, sementara kabupaten/kota lainnya masih mengandalkan layanan secara konvensional di sekretariat dinas masing masing daerah. Dengan hadirnya counter pelayanan Disdikbud, maka MPP Lambaro tak hanya berkuat di sektor perizinan usaha, adminduk hingga pembuatan paspor serta puluhan layanan lainnya, namun kini bertambah layanan sektor pendidikan. Adapun layanan yang diberikan Disdikbud Aceh Besar antara lain, Penerbitan Surat Izin Penelitian Jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP, Penerbitan Surat Pengganti Ijazah Hilang dan Rusak untuk Jenjang TK/PAUD, SD, dan SMP, Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Pelaksanaan Kegiatan Tingkat PAUD, Pendidikan Non Formal, SD, dan SMP. dan masih banyak pelayanan lainnya salah satunya juga ada pelayanan tambahan Konsultasi Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional Guru, Konsultasi NUPTK dan Konsultasi Dapodik.

- **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Inovasinya Aplikasi Puja Indah**

Komitmen Pemkab Aceh Besar untuk mengembangkan aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) merupakan hasil pengkajian, perekayasa, pendataan, adopsi dan modifikasi, serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi berskala nasional, sebagai upaya untuk mendorong inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan mengintegrasikan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Puja Indah merupakan aplikasi yang dibangun Kemendagri melalui Badan Litbang untuk meningkatkan inovasi di daerah. Masyarakat harus mendapatkan layanan yang dibutuhkan dengan maksimal mulai dari layanan yang menjadi hak konstitusional dasar seperti hak-hak kependudukan sampai dengan layanan-layanan yang sifatnya administratif dan ekonomis, agar bisa mendukung penyelenggaraan layanan di daerah sampai di tingkat pusat. Puja Indah merupakan salah satu solusi untuk membantu permasalahan pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Terutama dalam mendukung dan mendorong percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.

- **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Inovasinya Layanan Perizinan Keliling**



Demi mempermudah proses perizinan kepada masyarakat, DPMPTSP Aceh Besar meluncurkan inovasi layanan perizinan keliling untuk pelaku usaha hingga ke pelosok Pulo Aceh. Pelayanan keliling tersebut sebuah langkah inovasi, agar pelaku usaha dapat dibantu pengurusan izin usaha langsung di tempat domisilinya, termasuk ke Kecamatan Pulo Aceh. Tujuan utama dari layanan keliling ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama yang berada di

daerah dan kecamatan terpencil. Karena tidak semua masyarakat bisa dengan mudah mengakses kantor pelayanan di pusat kota, maupun di Lambaro. Sehingga dengan layanan keliling ini lebih mudah mereka dapat mengurus perizinan, apalagi seperti warga Kecamatan Pulo Aceh, Lhoong, Lembah Seulawah, Seulimeum dan Mesjid Raya. Semakin banyak pelaku usaha terbantu untuk pengurusan izinnya karena lebih dekat dan cepat

- **Dinas Komunikasi dan Informasi dengan Inovasinya dalam Program VSAT dorong Digitalisasi di Daerah Pelosok**

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar terus berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital di seluruh wilayah, termasuk daerah pelosok, melalui penguatan konektivitas internet. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah perluasan program Very Small Aperture Terminal (VSAT) pada 2024. Program ini bertujuan untuk mendukung digitalisasi di berbagai sektor, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pemerintahan, dan pengembangan pariwisata. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh Besar melalui layanan publik berbasis teknologi informasi. Pemkab Aceh Besar pada 2024 berhasil memasang 257 unit VSAT, sebuah pencapaian signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya memasang 20 unit pada 2023 dan 25 unit pada 2022. VSAT ini tersebar di berbagai lokasi penting, seperti kantor desa, sekolah, Puskesmas, dan tempat wisata strategis di berbagai kecamatan. Keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia, yang berperan dalam memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital di Indonesia. Dengan keberhasilan perluasan program VSAT, Pemkab Aceh Besar menegaskan komitmennya untuk menjadi pelopor dalam transformasi digital di Indonesia.

- **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan Inovasinya Layanan Perizinan Keliling dan LARASKA**

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kembali menyediakan layanan Layanan Restorasi Arsip Keluarga (LARASKA) di Mal Pelayanan Publik (MPP). Layanan restorasi ini menggunakan metode enkapsulasi, yaitu teknik pengawetan arsip dengan cara membungkusnya dalam plastik khusus yang kedap udara dan air. Metode ini efektif untuk melindungi arsip dari kerusakan lebih lanjut akibat kelembaban, jamur, dan serangga. LARASKA dapat membantu dalam memberikan pelayanan pembuatan dokumen-dokumen penting bagi masyarakat yang terimbas oleh bencana Pemkab Aceh Besar bersama ANRI kembali melaksanakan LARASKA sebagai upaya menyelamatkan warisan berharga mereka. LARASKA bukan hanya sekadar layanan restorasi arsip, tetapi juga sebuah upaya untuk menjaga memori kolektif masyarakat Aceh. Dengan menyelamatkan arsip keluarga, kita turut melestarikan sejarah dan identitas bangsa.

- **RSUD Aceh Besar dengan Inovasinya dalam Program Antrian Online serta Poliklinik TBRO dan Poliklinik Laktasi**

program antrian online yang dijalankan RSUD Aceh Besar juga telah berjalan secara maksimal, bahkan sudah mencapai target di bawah 60 menit untuk antrian pasien. Karena, dalam antrian online itu, pasien tidak boleh menunggu lebih dari 1 jam dan kriteria tersebut sudah pihaknya penuhi. Maka untuk itu, sekarang rata-rata pasien sudah tertangani sesuai SOP, kurang dari 1 jam ataupun 60 menit, paling tinggi 30 menit, itu sudah tertangani pasien. Hal ini dilakukan bersamaan dengan penerapan Mobile JKN, sehingga pasien tidak perlu lagi antri, pihaknya menerapkan antrian online itu semenjak pasien mengambil rujukan dari Puskesmas hingga berobat ke RSUD, manfaat mobile JKN ini adalah pasien tidak perlu antri lagi di RSUD, sekarang pasien bisa langsung memilih dokter, jam berobat dan Poli pelayanan sesuai penyakit yang di derita oleh si pasien itu sendiri. sekarang RSUD Aceh Besar sudah memiliki poliklinik terbaru yaitu TBRO yang menangani khusus penyakit TBC yang resisten dengan obat dan pengobatan khusus untuk pasien TBC, yang dipisahkan dengan pasien-pasien umum lainnya. Selain itu, di tahun 2024 RSUD juga telah membuka Poliklinik LAKTASI atau konsultasi tentang menyusui yang baik dan benar. Itu merupakan inovasi baru yang di kolaborasi dengan poliklinik kebidanan dan poliklinik anak.

PENUTUP

BAB IV



Kesimpulan

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 disusun sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun dan juga berperan sebagai, alat kendali, penilai kinerja dan sebagai alat pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran, tujuan dan penjabaran Strategi Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menetapkan 16 (enam belas) sasaran strategis dan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sasaran. Secara umum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah memperlihatkan hasil kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.

Berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2024 ada beberapa sasaran yang belum sepenuhnya optimal dilaksanakan namun nilai capaian rata-rata adalah 93% , Adapun akibat pencapaian tidak optimal antara lain :

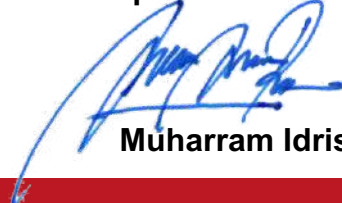
- Masalah aparatur daerah masih ada yang belum memahami tugas pokok, fungsi serta Kewenangan yang dimilikinya;
- Kurangnya sumber daya terutama sumber daya manusia yang berkualitas;
- Kurangnya alokasi anggaran; dan
- Masih kurangnya data yang terkumpul dilapangan.

Harapan yang hendak dicapai antara lain :

- Peningkatan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang masing-masing
- Penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan pencapaian sasaran-sasaran yang masih kurang realisasi.
- Adanya evaluasi terhadap sasaran kinerja pertriwulan per/OPD agar memudahkan dalam penyusunan LKJIP Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini disusun sebagai evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat menjadi dorongan dan acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di masa-masa mendatang.

Kota Jantho, 17 Maret 2025
Bupati Aceh Besar,



Muharram Idris